



ISEN MULANG

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



3

Kalteng Ambil Bagian dalam
Prosesi Penyatuan Tanah dan
Air di Tikik Nol IKN Nusantara



10

Wagub Kalteng Buka
Sosialisasi Pengelolaan
Dana BOS SMA/SMK/SLB



18

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran
Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan
Shrimp Estate di Sungai Raja
Kabupaten Sukamara

**DITERBITKAN BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Administrasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Biro
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Biro
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Penyajian Materi Pimpinan pada
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Redaktur :

Setya Sri Saryanta, Noriko Yunanto

Penyedia Bahan :

Rani Diah Anggraini

Staf Redaksi :

Dewi Yulianti, Winda Paskanova

Renny Patrisia, Irawulan

Fotografer :

Ferdo Hutkrianto, Efendy

Layout :

Benito Zuares

Operator Komputer :

Kamala Sri Yadiyawati Rasan

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No 1 Palangka Raya

Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Website : <https://setda.kalteng.go.id>

<https://btroadpim.kalteng.go.id>

Facebook : <http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng>

Twitter : http://www.twitter.com/setda_kalteng

Instagram : [@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/@sekretariat.daerah.kalteng)

Youtube : Sekretariat Daerah Kalteng

DAFTAR ISI :

Kalteng Ambil Bagian dalam Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di Titik Nol IKN Nusantara	3
Kalteng Gelar Prosesi Ailat Pelepasan Tanah dan Air untuk Dibawa ke IKN Nusantara	4
Wagub Terima Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP Kalteng	5
Wakil Gubernur Asisten Pemerintahan dan Kesra Hadiri Pembukaan Konferensi PW IPPNU Kalteng	6
Asisten Pemerintahan dan Kesra Hadiri Pembukaan Kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah Se-Kalteng Tahun 2022	6
Pemprov Kalteng Ikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	7
Wagub Kalteng Buka Workshop Pendalaman Tugas DPRD Barsei	8
Pj Sekda Kalteng Buka FGD Persiapan Pendataan dan Pemetaan Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan	8
Pj Sekda Kalteng Hadiri Secara Virtual Pelantikan Sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kemendagri	9
Wagub Kalteng Buka Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK/SLE	10
Pj Sekda Kalteng Hadiri Rapat Konsolidasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Persiapan Rakornas PBI	11
Pemprov Kalteng Apresiasi Ailih Status STAKN Palangka Raya Menjadi IKN	11
Gubernur Kalteng Sambut Baik Kunjungan Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI	12
Gubernur Harapkan Capaian Monitoring Centre for Prevention Semakin Ditingkatkan untuk Wujudkan Kalimantan Tengah Bebas Korupsi	13
Tindak Lanjut Pasca Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke-Fungsional Pemprov Kalteng Gelar Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian	14
Tingkatkan Kebugaran dan Imunitas Tubuh, Jajaran Pemprov Kalteng Senam Bersama	15
Wagub Kalteng Dialog Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bahas Penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis 2023	16
Pj Sekda Kalteng Ikuti Rakor Pengendalian Harga Pangan	16
Wagub Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD Pemprov Kalteng TA 2021	17
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Shrimp Estate di Sungai Raja Kabupaten Sukamara	18
Foto-Foto Kegiatan Pemprov Kalteng	19

TITIK NOL

Kalteng Ambil Bagian dalam Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di Titik Nol IKN Nusantara



Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ambil bagian dalam prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Senin, 14 Maret 2022. Dalam kegiatan yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo ini, tampak hadir dari Provinsi Kalteng, Wakil Gubernur Edy Pratowo

Tanah dan air dalam prosesi ini berasal dari lokasi-lokasi tertentu di 34 Provinsi di Indonesia yang mewakili keanekaragaman lokal dan budaya masing-masing daerah. Pada prosesi ini, para Gubernur atau Wakil Gubernur menyerahkan tanah dan air dari daerahnya kepada Presiden untuk selanjutnya dituangkan menjadi satu ke dalam gentong yang sudah disiapkan.

Prosesi ini juga kemudian dirangkaikan dengan penanaman pohon bersama di sekitar lokasi penyatuan tanah dan air. Pada kegiatan penanaman pohon ini, para Gubernur atau Wakil Gubernur menanam pohon khas dari daerahnya masing-masing. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Edy Pratowo melakukan penanaman bibit pohon Jelutung (*Dyera Polyphylla*) sebagai pohon khas dari Bumi Tambun Bungai.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan awal dari sebuah pekerjaan besar. "Pada hari ini, Senin, 14 Maret 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara," ucap Presiden.

Pada kegiatan yang juga dihadiri 15 Tokoh Masyarakat Kaltim ini, Presiden tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada para Kepala Daerah dan 34 Provinsi. "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Gubernur. Ini merupakan bentuk dan kebhinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini," ujarnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga tinggi negara, MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan seluruh komponen masyarakat yang telah mendukung

dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Presiden berharap kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara akan sangat membantu agar apa yang dicita-citakan bangsa ini bisa segera terwujud. Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama berdoa agar pembangunan Ibu Kota Nusantara senantiasa mendapat kemudahan dan kelancaran.

Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan kerja kali ini, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.

Sementara itu, turut mendampingi Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, antara lain Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Herson B. Aden, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung, Kepala Bappedalitbang Kaspinor, Kepala Dinas TPHP Riza Rahmadi, Plt. Kepala Biro Perekonomian Said Salim, serta Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder.

Sebelumnya dibentakan, Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar prosesi adat pelepasan tanah dan air untuk dibawa ke IKN Nusantara, bertempat di Istana Iseh Mulang, Palangka Raya pada Sabtu (12/3/2022). Sampel tanah yang diambil dan disatukan sebagai simbolisasi dalam prosesi adat tumpang tawar tersebut berasal dari Bukit Batu Kasongan, Kabupaten Kutangan; tempat Pertapaan Pahlawan Nasional Tjilik Riwut; dari Kompleks Kesultanan Kutaringin di Pangkajene, Kabupaten Kotawaringin Barat; serta dari titik-titik lokasi di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalteng. Sedangkan sampel air, berasal dari titik lokasi pertemuan Sungai Kahayan dan Sungai Rungt, Palangka Raya serta dari titik-titik lokasi lainnya di 11 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Provinsi Kalteng (RAN/WIN/BPMI Setpres).

Kalteng Gelar Prosesi Adat Pelepasan Tanah dan Air untuk Dibawa ke IKN Nusantara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar prosesi pelepasan tanah dan air untuk diberangkatkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, bertempat di depan Lobi Istana Isen Mulang, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Sabtu pagi, 12 Maret 2022.

Sehubungan dengan ditetapkannya IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, Presiden RI Joko Widodo beserta para Gubernur se-Indonesia direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Titik Nol IKN, yang salah satu agendanya adalah akan dilaksanakan penyatuan tanah dan air dari daerah-daerah seluruh Indonesia.

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo mengutarakan bahwa acara pelepasan simbolisasi tanah dan air se-Kalteng ini sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden RI ke Titik Nol IKN tersebut, sekaligus melaksanakan penyatuan tanah dan air dari daerah-daerah di Indonesia.

"Saat ini merupakan suatu momen sejarah, saat kita bersama mengambil peran untuk menjadi bagian penting dari dinamika serta perjalanan Bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 2022, kita akan bersama menyaksikan sebuah peristiwa langka yaitu penyatuan tanah dan air dari seluruh daerah di Titik Nol IKN. Sebuah peristiwa langka yang menjadi simbol akan penyatuan seluruh elemen bangsa menuju Indonesia Baru," ungkapnya.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa hal ini membuktikan bahwa Kalimantan Tengah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Bersama dengan seluruh daerah lainnya di Indonesia, kita menyambut dengan antusias serta diringi sebuah harapan besar bagi Bangsa ini. Kita harus meyakini bahwa semua upaya Pemerintah, secara khusus pembentukan IKN adalah untuk kepentingan seluruh anak bangsa. Kemajuan Bangsa Indonesia adalah harapan serta tujuan kita bersama, yang pada akhirnya nanti juga akan berdampak bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah," jelas Wakil Gubernur.

Selanjutnya, Gubernur Sugianto Sabran melalui Wakil Gubernur Edy Pratowo, Gubernur



Wakil Gubernur H. Edy Pratowo didampingi Pj. Sekda Prov. Kalteng serta pejabat lingkup Provinsi Kalteng mengikuti gelar prosesi adat pelepasan tanah dan air di depan Lobi Istana Isen Mulang

Sugianto Sabran menyerahkan simbolisasi tanah dan air kepada rombongan agar dibawa ke IKN Nusantara untuk mengikuti prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh daerah di Indonesia. Kepada rombongan tersebut, disampaikan pula ucapan selamat menempuh perjalanan dan harapan agar rombongan tiba di tempat tujuan tanpa kurang satu apapun.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin dalam laporannya menyebutkan bahwa sampel tanah yang diambil sebagai simbolisasi, antara lain berasal dari Bukit Batu Kasongan, Kabupaten Katingan. Bukit Batu ini dikenal sebagai tempat Pertapaan Pahlawan Nasional Tjiik Riwut.

Lebih lanjut, disampaikan Pj. Sekda bahwa atas perintah Gubernur Kalteng untuk melakukan pengambilan tanah dan air di seluruh kabupaten/kota, serta 11 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kalimantan Tengah. Keseluruhan tanah dan air tersebut kemudian dibawa ke Kota Palangka Raya untuk disatukan.

Acara ini sendiri dirangkaikan dengan doa dan prosesi adat tumpang lawar oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Pemprov Kalteng. Usai prosesi adat, Wakil Gubernur Edy Pratowo didampingi Pj. Sekda Nuryakin beserta para pejabat yang hadir melepas secara resmi keberangkatan rombongan pembawa simbolisasi tanah dan air se-Kalteng ini ke IKN Nusantara. (REN/FEN).



Wagub Terima Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP Kalteng



Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menerima Ikhtisar Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng Tahun 2021, bertempat di Ruang Kerja Wagub Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Rabu, 2 Maret 2022.

Ikhtisar tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono. Turut pula hadir dalam acara penyerahan ini, di antaranya Auditor Ahli Utama Septo Nugroho dan jajaran Koordinator Pengawasan BPKP Kalteng.

Wagub Edy Pratowo menyambut baik adanya Ikhtisar Hasil Pengawasan dari BPKP terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng selama tahun 2021 ini. Beliau mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPKP yang telah melakukan pengawasan dan pendampingan kepada Pemprov Kalteng dalam penyelenggaraan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut, Wagub menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan senantiasa berupaya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dalam Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP ini, demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Bambang Ari Setiono menyampaikan bahwa selama tahun 2021 ini BPKP Kalteng telah melakukan sejumlah pengawasan yang diarahkan pada

isu-isu nasional dan daerah, dalam rangka mengawal percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Kegiatan pengawasan tersebut terbagi dalam beberapa aspek, yang meliputi pengelolaan keuangan negara, perlindungan manusia menghadapi pandemi, peningkatan ketahanan nasional, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, hingga penguatan good governance dan pengendalian kecurangan.

Kemudian, pengawasan difokuskan pada berbagai program/kegiatan, yakni akuntabilitas keuangan daerah, penyerapan anggaran dan PBJ daerah, ketahanan sistem kesehatan, ketahanan sistem perlindungan sosial, ketahanan sistem pendidikan, ketahanan korporasi UMKM, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan (food estate), penanggulangan bencana, pembangunan daerah dan desa, serta tata kelola instansi pemerintah.

Oleh karena itu, Bambang berharap hasil dari pengawasan BPKP Kalteng ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Pemprov Kalteng melalui jajaran Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memetakan risiko-risiko untuk melakukan perbaikan pada program yang belum terlaksana ataupun menemui hambatan saat proses pelaksanaannya.

Perwakilan BPKP Kalteng akan selalu siap untuk mendampingi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan dan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. (DY/1st).



Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Katma F. Dirun, mewakili Gubernur, menghadiri acara Konferensi Wilayah Ikatan Pelajar Puteri Nahdliyatul Ulama (Konferwil IPPNU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), bertempat di Aula Asrama Haji Al-Mabrur Kota Palangka Raya, pada Rabu, 9 Maret 2022.

Saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng pada acara tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi diselenggarakannya acara tersebut sebagai representasi kebangkitan kaum perempuan.

Asisten Katma F. Dirun kemudian mengungkapkan

harapan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran kepada para generasi muda agar dapat terus adaptif untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini.

Lebih lanjut Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun juga menyampaikan pesan Gubernur kepada para pelajar putri NU agar dapat turut berperan serta meneniskan pembangunan Kalimantan Tengah dengan berbekal semangat belajar.

Pada akhir sambutan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menekankan pula mengenai pentingnya sinergisitas semua pihak dalam membangun daerah, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah (NT).

Asisten Pemerintahan dan Kesra Hadiri Pembukaan Kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah Se-Kalteng Tahun 2022



Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Katma F. Dirun, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah Se-Kalteng Tahun 1443 H/ 2022 M, yang diselenggarakan di Aula Asrama Haji Al-Mabrur, Kota Palangka Raya, pada Rabu malam, 9 Maret 2022.

Dalam laporannya, Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Panitia Pelaksana Ahmad Pahruka menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro

Kesejahteraan Rakyat Nomor: 198/44/541/DPA-SKPD/2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 450/12/1-02/Kesra/2022 tentang Pembentukan Panitia Pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022.

Kegiatan ini sendiri bertujuan agar para peserta lebih termotivasi untuk memahami teknik mengukir/memahat dalam meningkatkan kreativitas seni dan inovasi melalui pemanfaatan limbah kayu di kalangan Pondok Pesantren. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-11 Maret 2022 di Aula Asrama Haji Al-Mabrur dan diikuti sebanyak 42 orang peserta se-Kalteng.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Kalteng H. Nook Fahmi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program Kemenag yakni mewujudkan kemandirian ekonomi pada pondok Pesantren yang ruang lingkupnya di antaranya diwujudkan dengan adanya bantuan inkubasi bisnis bagi pondok Pesantren dan Madrasah di Tahun 2022.

Kakanwil Kemenag Kalteng pun berharap agar pelatihan seperti ini dapat ditindaklanjuti dengan program lainnya dari Pemprov Kalteng dan Pemkab/Kota agar ilmu yang telah didapat bisa dimanfaatkan oleh Ustadz/Ustadzah, misalnya dengan memberikan bantuan alat ukir, dana pengembangan usaha seni ukir.

dan bantuan yang bersifat tindak lanjut lainnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan bahwa lembaga Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah merupakan tempat menuntut ilmu Pengetahuan selain lembaga pendidikan formal lainnya, untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan agama Islam.

Selain itu, Katma F. Dirun juga mengatakan bahwa pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah tidak serta merta mengkaji dan mengajarkan pendaalaman ilmu pengetahuan agama Islam saja, melainkan adanya pembelajaran tambahan (ekstrakurikuler) yang dapat menunjang Pendidikan Pesantren.

Hal ini diharapkan semakin menambah minat orang tua dan anak-anaknya untuk menimba ilmu pengetahuan di Pondok Pesantren. Terlebih lagi saat ini khususnya Pondok Pesantren sudah mengalami berbagai pembenahan dan perkembangan seiring berkembangnya kemajuan dan teknologi dalam dunia Pendidikan, namun tetap mengedepankan budaya dan kearifan lokal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu mengasah potensi, minat, dan bakat para Ustadz/Ustadzah dan anak-anak santri sebagai bekal mereka untuk menghadapi masa depan gemilang, di samping bekal ilmu pengetahuan agama Islam yang mereka miliki, sehingga mereka mampu menjadi bagian dalam upaya mendukung

dan mewujudkan KALTENG MAKIN BERKAH.

Lebih lanjut, kegiatan ini dirangka pula dengan penyerahan secara simbolis Alat Seni Ukir yang diserahkan kepada Ustadz H. Rusli pengurus Pondok Pesantren Sunan Jati di Kota Palangka Raya. Kegiatan yang digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan ini turut dihadiri sejumlah Pengurus Pondok Pesantren di Kalteng. (MAY/BZ)



Pemprov Kalteng Ikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Ruang Bajakah Kompleks Kantor Gubernur Kota Palangka Raya, pada Selasa, 1 Maret 2022. Hadir dan Pemprov Kalteng, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Katma



F. Dirun dan Pjt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Andri Arsyad.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini membahas mengenai pemerintahan umum, persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Saat memberikan arahan Dirjen Bahtiar menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut mengevaluasi urusan pemerintahan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Bapak/Ibu yang saya muliakan jadi koordinasi hari ini sebenarnya fokusnya adalah bagaimana evaluasi kita dan kedepan untuk penyelenggaraan pemerintahan umum," ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Lebih lanjut Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengharapkan agar rapat koordinasi tersebut bisa memberikan manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

"Kami berharap betul pertemuan ini bermanfaat untuk memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum," harap Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. (NY)

Wagub Kalteng Buka Workshop Pendalaman Tugas DPRD Barsel

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) H. Edy Pratowo hadir dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Workshop Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banté Selatan (Barsel) Tahun 2022, bertempat di Ballroom Best Western Batang Garing Hotel Kota Palangka Raya, pada Kamis, 10 Maret 2022.

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng Wagub Edy Pratowo memaparkan bahwa sebagai mitra sejajar Kepala Daerah DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD.

Selain itu, disampaikan pula bahwa pengelolaan anggaran daerah sesungguhnya memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan di daerah. Akan tetapi, tidak banyak daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik sehingga dapat mengurangi secara nyata penduduk miskin dan menciptakan kesejahteraan di daerahnya.

Problematika di seputar kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari bagaimana sistem, mekanisme, dan perilaku Pemerintahan Daerah dalam mengelola keuangannya. Berbagai persoalan penting terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain meliputi semua tahapan penganggaran, mulai dari perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi dasar kebijakan keuangan, baik

dalam KUA – PPAS maupun RAPBD setiap tahun dari regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. DPRD sebagai representasi suara masyarakat di tingkat lokal, tentu mempunyai kualitas pelayanan publik, penuntasan masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan alat utama untuk mencapai itu adalah APBD yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

"Saya berharap agar seluruh peserta Workshop bisa memanfaatkan dan mengadopsi semua pembelajaran serta dapat mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari sehingga tercapai birokrasi yang berdaya saing kompetitif untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Daerah melalui visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan KALTENG MAKIN BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)", pungkas Wagub Edy Pratowo (WIN/FEN).



Pj. Sekda Kalteng Buka FGD Persiapan Pendataan dan Pemetaan Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan



Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Pendataan dan Pemetaan Sawit Rakyat Dalam Kawasan Hutan di



Kalimantan Tengah, bertempat di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, pada Rabu, 16 Maret 2022.

FGD yang diselenggarakan atas kerja sama

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Yayasan KEHATI (Keanekaragaman Hayati Indonesia) ini diikuti oleh sejumlah perwakilan instansi terkait Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Pj Sekda Nuryakin mengatakan bahwa kegiatan pendataan dan pemetaan perkebunan kelapa sawit pekebun merupakan salah satu program/kegiatan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kalimantan Tengah.

Selain itu, Pj Sekda juga mengingatkan bagi Kabupaten/Kota yang belum menyusun dokumen rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, agar segera menyusunnya, dengan mengacu pada Inpres 6 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kalimantan Tengah, dengan mekanisme penyusunannya menyesuaikan panduan Kementerian Dalam Negeri.

"Dalam kesempatan ini, saya mengharapkan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan, agar berkenan untuk proaktif dalam kegiatan pendataan dan pemetaan lahan sawit pekebun yang masih terindikasi berada dalam kawasan hutan," ujarnya.

Berjalan harapan, melalui kegiatan ini kita akan

memiliki data kondisi existing luas lahan sawit para pekebun yang tersebar di Kabupaten/Kota, dan dengan mengetahui data lahan ini akan memudahkan dalam upaya penyelesaian tata ruangnya, terutama dari sektor kehutanan dan penataan ruang untuk komoditi perkebunan dan komoditi sektor lainnya di Kalimantan Tengah," ungkap Pj. Sekda Nuryakin.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sri Suwanto mengatakan bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022, daerah diminta untuk melakukan identifikasi dan pendataan perkebunan kelapa sawit ke kebun yang terindikasi dalam kawasan hutan.

"Tim pendataan dan pemetaan ini banyak melibatkan tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi maupun tim PSR Kabupaten/Kota. Saya berharap pendataan sawit ke kebun yang berada di kawasan hutan itu tidak hanya berhenti kepada hanya data saja, namun menjadi trigger, menjadi peringatan pada pusat untuk meringankan persyaratannya, karena selama ini PSR ini diwajibkan harus Areal Penggunaan Lain (APL). Sementara kalau APL ini sangat sulit, karena APL hampir semuanya sudah dikuasai oleh perusahaan, sedang untuk masyarakat paling sedikit," pungkias Sri Suwanto. (WIN/REN/BZ).

Pj. Sekda Kalteng Hadiri Secara Virtual Pelantikan Sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kemendagri

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Pj Sekda Kalteng) H. Nuryakin menghadiri acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah 2, Kompleks Kantor Gubernur Kota Palangka Raya pada Kamis 10 Maret 2022.

Turut hadir mendampingi Pj Sekda Kalteng mengikuti acara pelantikan tersebut, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) H. Kaspinor dan Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Anang Birjo.



Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik langsung sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat. Acara pelantikan yang digelar secara hybrid ini disaksikan melalui konferensi video oleh Pemerintah Daerah se-Indonesia.

Adapun para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemendagri yang dilantik kali ini, yaitu Suhajar Diantoro sebagai Sekretaris Jenderal Teguh Setyabudi sebagai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Agus Fatoni sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Sugeng Haryono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Eko Prasetyanto Purnomo Putro sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Ketika menyampaikan sambutannya, Mendagri Tito Karnavian berpesan kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah yang hadir secara virtual untuk dapat cepat beradaptasi di tengah berbagai perubahan.

Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa perlunya melakukan perubahan serta reformasi birokrasi dalam rangka untuk terus meningkatkan layanan publik agar lebih baik lagi. (REN/BZ).

Wagub Kalteng Buka Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK/SLB



Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) H. Edy Pratowo membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB Tahun 2022, bertempat di Ruang Pertemuan Hotel M. Bahalap, Kota Palangka Raya, pada Rabu, 9 Maret 2022.

Pada kesempatan itu, Edy Pratowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama suatu Negara untuk bisa maju, di mana pendidikan harus mampu mentransformasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi produktif, kreatif, inovatif, tangguh, dan terus memberikan yang terbaik untuk bangsa. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan nasional menjadi sangat penting.

Sebagai wujud komitmen terhadap hal tersebut, Wagub pun menerangkan bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan alokasi anggaran yang cukup besar untuk pendidikan, salah satunya melalui program Dana BOS. Program ini bertujuan untuk menyalurkan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan, dengan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Dijelaskan pula bahwa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menaruh perhatian serius terhadap bidang pendidikan, sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang termuat dalam RPJMD 2021-2026, tepatnya misi ke 4, yaitu "Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing". Untuk itu, dalam rangka mendukung BOS Reguler dari Pemerintah Pusat di tahun 2022 ini, Pemprov melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan dana BOS Daerah (BOSDA) bagi jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB se-Kalteng, tentunya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Wagub menandatangani Dana BOS dan BOSDA tersebut hendaknya dikelola secara terfisi, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kalteng. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari pendampingan Pemprov terhadap satuan pendidikan di bawah kewenangannya, dalam hal pengelolaan dana yang dikelola oleh sekolah, baik BOS maupun BOSDA.

"Dengan tersampainya sejumlah informasi tentang pengelolaan Dana BOS maupun BOSDA bagi 237 Sekolah SMA, 137 SMK dan 24 SLB di Kalimantan Tengah, diharapkan para penanggung jawab BOS maupun BOSDA di tingkat Satuan pendidikan tersebut dapat memiliki persepsi yang sama serta memiliki pemahaman yang benar dalam pengelolaan dana tersebut, yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku," tegas Wagub Edy Pratowo.

Pendampingan ini sendiri sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 907/6479/SJ dan Nomor 7 Tahun 2021, di mana Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan wajib melakukan pendampingan, pengawasan dan pembinaan kepada Satuan Pendidikan di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, pada kegiatan pembukaan Sosialisasi tersebut, Wagub Kalteng menyerahkan secara simbolis BOSDA kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Ahmad Syaifudi, yang kemudian diikuti pula dengan penyerahan penghargaan apresiasi kepada 5 Sekolah yang menjadi pemenang dalam pengelolaan Dana BOS tercepat untuk tahun 2021. (MAY/PEN)



Pj. Sekda Kalteng Hadiri Rapat Konsolidasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Persiapan Rakornas PBJ

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Pj Sekda Kalteng) Nuryakin menghadiri Rapat Konsolidasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Persiapan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas PBJ) secara virtual melalui konferensi video dari ruang rapat Bajakah, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Senin, 21 Maret 2022.

Rapat konsolidasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas progres persiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pelaksanaan rapat koordinasi nasional pengadaan barang/jasa.

Saat memberikan kata pengantar, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini juga dilaksanakan untuk mencari solusi atas hambatan yang terjadi pada suplai dan rantai distribusi pangan.

Bahwa sampai hari ini, suplai dan distribusi pangan masih menjadi kendala-kendala. Kalau itu menjadi faktor penghambat segera kita harus selesaikan, ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro berpesan agar memaknai usaha-usaha untuk menstabilkan harga pangan dan distribusi sebagai ibadah. Menstabilkan harga pangan, menyampaikan pangan kepada masyarakat dengan cepat. Rakyat akan terlindungi oleh negara, dan akan mendoakan kita semua. Mari kita maknai kerja ini dalam dimensi ibadah,

dengan tulus dan ikhlas, ujarnya.

Selanjutnya, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa Kepala Negara direncanakan akan menghadiri langsung pada acara Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2022 di Provinsi Bali.

Presiden akan langsung memberikan pengarahan dan mengupdate Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah mengalokasikan pembelian produk-produk dalam negeri dari seluruh penggunaan daerah, tandasnya.

Tampak pula hadir mendampingi Pj. Sekda Kalteng untuk mengikuti rapat konsolidasi tersebut, diantaranya Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aster Bonawaty dan Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Suharno. (NY)



Pemprov Kalteng Apresiasi Alih Status STAKN Palangka Raya Menjadi IAKN

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Eiko, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, mendampingi Wakil Menteri Agama Zamut Tauhid Sa'adi dalam acara Peresmian Alih Status Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) di Gedung Serbaguna, Kota Palangka Raya, pada Selasa, 15 Maret 2022.

Dalam kesempatan tersebut, selain melakukan peresmian alih status dari STAKN menjadi IAKN Palangka Raya, Wakil Menteri Agama Zamut Tauhid Sa'adi juga sekaligus meresmikan gedung serbaguna yang dimiliki IAKN Palangka Raya.

Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabren, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Eiko menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas beralihnya status STAKN menjadi IAKN Palangka Raya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan juga mengatakan pembangunan



sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan bukti nyata dalam mewujudkan Kalteng Makin Berkali.

Lebih lanjut, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Eiko mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) juga mengharapkan IAKN Palangka Raya dapat memberikan manfaat bagi kemajuan masyarakat Kalimantan Tengah. (NY/FH)

Gubernur Kalteng Sambut Baik Kunjungan Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2021, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Selasa pagi, 15 Maret 2022.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Binjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama dan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korsup Wilayah III Edi Suryanto beserta beberapa anggota Tim.

Sementara itu, tampak pula hadir mengikuti kegiatan tersebut, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Nuryakin, Inspektur Saring, Auditor Ahli Utama Inspektorat Sapto Nugroho, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait.

Dalam arahnya, Gubernur Sugianto Sabran menyambut baik kunjungan Tim Korsup Pencegahan Korupsi Wilayah III KPK ke Kalteng, untuk memberikan pendampingan dan pembinaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terbebas dari korupsi. "Kami senang sekali diarahkan, dibimbing dan diingatkan terus," ungkap Gubernur.

Gubernur Sugianto Sabran pun meminta kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya yang terkait



dengan 8 area intervensi aksi pencegahan korupsi agar dapat kooperatif dan bekerja sama baik dengan Tim KPK tersebut.

"Sekali lagi, saya sangat senang sekali. Pak, atas kegiatan-kegiatan KPK yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya kegiatan pada hari ini dan 2 hari ini. Teman-teman dan OPD (Perangkat Daerah), saya minta membuka, membuka dan meminta masukan (dari KPK)," tutur Gubernur Sugianto Sabran.

Selanjutnya, Gubernur Sugianto Sabran juga menyatakan

kesiapan Provinsi Kalimantan Tengah apabila mendapat kepercayaan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan KPK berskala nasional. "Kalau memang kami dimintai iya sebagai tuan rumah, kami siap menjadi tuan rumah KPK RI di Kalimantan Tengah dalam rangka pemberantasan korupsi," ucap Gubernur Sugianto Sabran.

Lebih lanjut, Gubernur Kalteng meminta bantuan KPK RI bekerja sama dengan APIP dan APH untuk dapat melakukan pengawasan terhadap beberapa program infrastruktur strategis multiyears, di antaranya pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Kecamatan Hanau, Kantor Kejaksaan Tinggi, dan Bundaran Besar.

"Kita kebetulan ada multiyears juga, ada multiyears ada di beberapa titik, secara kualitas saya mohon bantuan untuk mengawasi secara ketat," pungkas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. (SSS/EZ)



Gubernur Harapkan Capaian Monitoring Centre for Prevention Semakin Ditingkatkan untuk Wujudkan Kalimantan Tengah Bebas Korupsi



Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Senin, 14 Maret 2022.

Dalam sambutan yang dibacakan Pj. Sekda Nuryakin, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir pada Rakor Kalteng ini baik secara virtual maupun langsung, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi juga diberikan atas sinergitas dan koordinasi semua pihak untuk mewujudkan kondisi yang kondusif dalam rangka mewujudkan Kalteng bebas korupsi, melalui upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Bumi Tambun Bungai.

Gubernur pun mengungkapkan rata-rata capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2021 Provinsi Kalteng yang cukup tinggi dan menembus angka 92,92%. Capaian tersebut, meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD 95,8%, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 93,64%, Penzinan 95,71%, Penguatan APIP 97,27%, Manajemen ASN 80,77%, Optimalisasi Pajak Daerah 99,96%, serta Manajemen Aset Daerah 82,60%.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 82,78%, maka capaian tahun 2021 meningkat 10,14%. Sementara itu, ditambahkan pula bahwa capaian MCP tahun 2021 untuk tingkat Pemerintah Daerah se-Kalteng adalah sebesar 77% atau naik 13% apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 64%.

Gubernur Kalteng melalui Pj. Sekda pun berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan. "Untuk itu, saya mengimbau hal ini untuk terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang bebas korupsi," tegas Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Pj. Sekda Nuryakin.

Lebih jauh, diberberkan juga, Tingkat Kepatuhan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalteng adalah 100%, dengan jumlah wajib lapor sebanyak 485 orang. Sementara itu, Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah Se-Kalteng, yakni 94,85% atau naik 3,73% dari tahun 2020 yang sebesar 91,12%. Sedangkan untuk Tingkat Kepatuhan LHKPN Tahun 2021 DPRD Provinsi Kalteng, yakni 77,78%, dengan jumlah wajib lapor sebanyak 45 orang per 9 Maret 2022.

Selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan kinerja, khususnya dalam capaian 8 area intervensi, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten/ Kota, untuk berperan aktif sesuai dengan kapasitas masing-masing, dalam mendukung dan menjalankan program pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing.

Gubernur juga meminta seluruh entitas yang memiliki tanggungjawab dan peran dalam pericapaian 8 area intervensi untuk segera melakukan akselerasi kinerja guna mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Terakhir, Gubernur meminta langkah-langkah preventif didahulukan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi, untuk memperkuat sinergitas pemerintah daerah dalam menegakkan dan memberantas tindak pidana korupsi di Kalteng (RAN/BZ).

Tindak Lanjut Pasca Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Fungsional, Pemprov Kalteng Gelar Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian se-Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Acara rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis, 17 Maret 2022.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, dalam rangka untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pasca pelaksanaan pelantikan serta hal-hal yang dinilai penting dan strategis terkait organisasi dan kepegawaian di Kalimantan Tengah.

Saat memberikan sambutan, Penjabat Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa rapat koordinasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019, yang salah satunya adalah perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level, dan mengganti

atau mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.

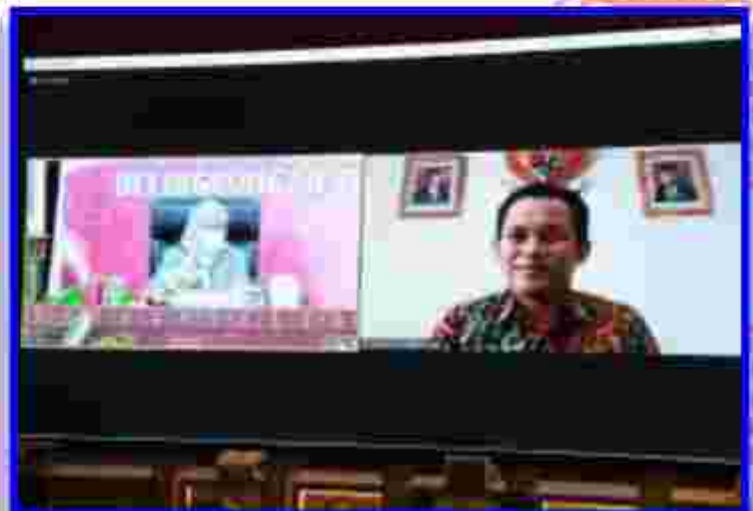
"Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut telah kita laksanakan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan ada peningkatan kinerja birokrasi agar lebih gesit, dinamis, dan

adaptif terhadap lingkungan strategis," ungkap Penjabat Sekretaris Daerah.

Lebih lanjut, Penjabat Sekretaris Daerah berharap rapat koordinasi ini dapat mengidentifikasi dan menemukan solusi persoalan pasca pelaksanaan pelantikan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan yang timbul, terutama dalam hal administrasi kepegawaian.

"Saya mengajak kita semua untuk dapat menyampaikan identifikasi permasalahan yang terjadi pada masing-masing pemerintah daerah, agar selanjutnya dibahas dan ditemukan solusi terbaik dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi ujanjnya

Hadir pula pada rapat koordinasi tersebut diantaranya Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah, Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lida Ariyana (NY/BZ)



Tingkatkan Kebugaran dan Imunitas Tubuh, Jajaran Pemprov Kalteng Senam Bersama



Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo menghadiri kegiatan Senam Pagi Bersama dengan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng).

Kegiatan senam bersama tersebut dilaksanakan di Halaman Istana Isen Mulang, Kota Palangka Raya, Jumat, 11 Maret 2022. Olah raga senam ini digelar dalam rangka untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan kepada para Kepala Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan kegiatan olah raga bersama setiap Jumat pagi di instansinya masing-masing tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Di samping itu, Wagub Kalteng juga menyampaikan bahwa kegiatan Car Free Day (CFD) yang biasanya dilakukan di hari Minggu rencananya akan kembali dibuka, tetapi dengan aturan dilaksanakan di lingkungan luar buka dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat berolahraga guna menjaga kesehatan.

Sementara itu, Pejabat

Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kalteng Nuryakin menambahkan dengan dibukanya kembali Car Free Day, diharapkan perekonomian akan bisa semakin bergerak, di mana dalam kegiatan Car Free Day, ada kegiatan-kegiatan ekonomi dari pedagang maupun UMKM.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pj. Sekda Kalteng juga menekankan bahwa dalam kegiatan Car Free Day itu, para pelaku ekonomi atau UMKM yang boleh menggelar dagangan atau berjualan harus sudah menerima vaksinasi COVID-19.

Hal ini dilakukan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kalteng kepada seluruh kabupaten/kota, secara khusus Kota Palangka Raya, untuk dapat membuka kembali kegiatan Car Free Day yang akan dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan. (MAY/BZ)



Wagub Kalteng Dialog Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bahas Penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis 2023

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Edy Pratowo menghadiri acara Dialog Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dengan Para Gubernur Wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan Tahun 2022, bertempat di Courtyard Bali Nusa Dua Resort, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Kamis, 17 Maret 2022.

Rapat koordinasi dengan format dialog bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas ini digelar dalam rangka untuk melakukan penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan dilaksanakan di daerah tahun 2023, sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2023.

Adapun Kepala Daerah yang diundang dalam dialog bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharsa Monoarfa kali ini terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Dalam dialog ini, para Gubernur atau yang mewakili diberi kesempatan untuk menyampaikan maksimal 3 proyek usulan yang paling diprioritaskan di tahun 2023, sebagai bagian atau pendukung pelaksanaan Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Berbagai usulan tersebut dapat dilakukan baik dengan memilih proyek yang telah direvisikan dalam RPJMN 2020-2024 maupun proyek lainnya sebagai usulan strategis dan pemerintah daerah untuk mendukung Prioritas Nasional.

Kegiatan kali ini diawali dengan arahan pembuka dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharsa Monoarfa, yang dilanjutkan dengan sesi dialog dengan para Kepala Daerah atau yang mewakili. Dialog yang terbagi 2 sesi (pagi dan siang) ini terdiri dari paparan dari masing-masing Provinsi dan kemudian tanggapan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Untuk sesi pagi, paparan usulan proyek prioritas strategis pada tahun 2023 adalah dari Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Ridwan Kamil, Kalimantan Tengah oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, serta DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DIY masing-masing oleh Kepala Bappeda.

Sementara itu, untuk sesi siang yang mendapatkan kesempatan paparan, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali, yang masing-masing disampaikan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atau yang mewakili. (SSS/ist)



Pj. Sekda Kalteng Ikuti Rakor Pengendalian Harga Pangan

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Pj. Sekda Kalteng) Nuryakin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Pangan secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Bajakah 2, Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Jumat, 18 Maret 2022.

Rakor yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian, yang didampingi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Dalam arahnya, Mendagri Tito Karnavian

memaparkan bahwa salah satu kebutuhan dasar yang mendasar bagi rakyat dan bangsa kita adalah masalah pangan, yang akan berdampak luas kalau terjadi tidak stabilnya ketersediaan pangan.

Lebih lanjut disampaikan, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga pangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, di antaranya sudah dibentuk tim penanganan inflasi. Kemudian, Presiden juga sudah membentuk lembaga baru, yaitu Badan Pangan Nasional, sebagai bentuk keseriusan untuk menjaga stabilitas pangan bagi rakyat.

Di samping itu, untuk tingkat daerah, ada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Inflasi ini bersifat umum, yang salah satu komponen inflasi adalah



stabilitas harga pangan. "Maka pada 14 Mei 2020, yang pada saat itu juga terjadi kenaikan harga beberapa komoditas dan kita melihat bahwa TPID ini terlalu luas, maka yang spesifik yaitu saya mengeluarkan surat edaran untuk dibentuk di seluruh daerah Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Sekda masing-masing. Kami juga mengeluarkan aturan pada 8 Agustus untuk pembentukan Satgas," beber Mendagri.

"Pada kesempatan ini, dengan adanya kenaikan beberapa komoditas bahan pangan yang mendasar ini harus kita tindak lanjuti, kita harus tangani agar kembali stabil. Untuk mengerjakan ini perlu mesin besar, tidak cukup hanya pemerintah pusat, tetapi semua pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) harus bertindak, jangan dibiarkan. Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas pangan," imbuhnya.

Oleh karena itu, seluruh Sekda dan seluruh pejabat yang tergabung dalam Satgas Pangan diminta untuk mengambil langkah-langkah yang dipertukan. Tugas Satgas Pangan yang paling utama adalah setiap hari memantau, memonitor harga 9 (sembilan) bahan

pokok dan komoditas pangan lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Mendagri juga menekankan untuk di daerah, yang perlu diawasi adalah distribusi. Jadi, kalau problemnya suplai yang kurang, maka perlu ada dua langkah. Yang pertama adalah antar daerah bisa melakukan kerjasama untuk mengatasi potensi kekurangan suplai. Lalu alternatif kedua adalah bantuan dari pusat.

Sedangkan, untuk masalah distribusi, perlu dilakukan langkah-langkah pendekatan kepada para distributor bahan pangan. Jelaskan supaya distribusinya dilancarkan, jangan sampai terjadi kelangkaan yang akan menimbulkan keributan. Kalau pendekatan tidak berhasil, maka selanjutnya perlu dilakukan penegakan hukum.

"Jadi tolong mulai hari ini betul-betul Satgas Pangan bergerak untuk membahas stabilitas pangan di daerah masing-masing, dan mengambil langkah-langkah, yaitu memenuhi suplai maupun untuk menjaga agar distribusi betul-betul lancar dan pangan tersedia bagi masyarakat," pungkas Mendagri Tito Karnavian. (WIN/BZ)

Wagub Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD Pemprov Kalteng TA 2021

Wakil Gubernur Edy Pratowo menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran (TA) 2021 bertempat di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur Kota Palangka Raya, pada Kamis, 24 Maret 2022.

Rertemuan Entry Meeting ini digelar sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan terhadap LKPD Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng).



Tim dari BPK RI Perwakilan Kalteng akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 30 hari dimulai sejak 24 Maret 2022. Dalam rangka pemeriksaan dibutuhkan data dan dokumentasi awal yang diharapkan dapat diterima oleh BPK RI Perwakilan paling lama pada hari Senin, 28 Maret 2022, dalam bentuk softcopy melalui google drive Tim Pemeriksa LKPD Pemerintah Provinsi Kalteng TA 2021.

Wagub Edy Pratowo dalam arahannya, memaparkan bahwa sebagai suatu proses akhir, maka kegiatan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga seluruh proses pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalteng siap diperiksa kepada seluruh Perangkat Daerah agar terbuka dan jangan menghindari urai Wagub.

Wagub kemudian berharap BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjalin komunikasi dengan seluruh jajaran pemerintah daerah, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat disediakan dengan baik. Selain itu, diharapkan pula BPK RI dapat melakukan pembinaan baik melalui konsultasi maupun bersaga saran dan rekomendasi. (WIN/ED)

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Shrimp Estate di Sungai Raja Kabupaten Sukamara



Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau Lokasi Rencana Pembangunan Shrimp Estate Tambak Udang Vaname yang berlokasi di Sungai Raja, Kabupaten Sukamara, pada Selasa, 1 Maret 2022. Tampak mendampingi dalam peninjauan ini, Bupati Sukamara Windu Subagio.

Di sela-sela peninjauan, Gubernur Sugianto Sabran dalam arahnya berharap pembangunan Shrimp Estate ini dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalteng dan bahkan BUMdes serta untuk pembiayaan agar difasilitasi oleh Bank Kalteng dan Himbara.

Gubernur Kalteng juga berharap dengan sinergitas seluruh pihak dapat mendukung pembangunan shrimp estate di Kabupaten Sukamara. Selain itu, perhitungan ekonomi harus matang, termasuk dalam hal kestabilan harga antar pengusaha udang di Sukamara.

Gubernur Kalteng mengharapkan masyarakat ikut berperan serta dan berpartisipasi dalam menyelesaikan rencana pembangunan kawasan shrimp estate ini. Pembangunan kawasan shrimp estate diharapkan tidak jalan di tempat dan bisa sukses.

Gubernur menambahkan Bumdes juga bisa ikut berperan, di mana dana desa cukup besar dan potensial, sehingga Bumdes dapat menjadi percontohan di Indonesia. Oleh karena itu, Gubernur Kalteng mengharapkan Bupati Sukamara agar menyusun rencana pembangunan kawasan industri dan juga kawasan wisata, dengan dana terbatas tetapi hasilnya maksimal. (MAY/1st).





Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah, bertempat di Gedung Gajah, Jayasabha, Komplek Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kota Denpasar, Sabtu (26/3/2022).

Wakil Gubernur H. Edy Pratomo melepas secara simbolis Kafilah Kalimantan Tengah untuk mengikuti ajang Festival Anak Sateh Indonesia (FASI) XI Tingkat Nasional, bertempat di Aula Tan'im, Lantai II, Ar-Ranma Haji Al-Mabrur Palangka Raya, Selasa (22/3/2022).



Wakil Gubernur Edy Pratono menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Food-Estate di Provinsi Kalimantan Tengah, yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dengan didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2022).



Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratono bersama Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Kalteng menyerahkan secara simbolis paket bantuan kepada Panitia Asuhan dan Pengurus Pondok Pesantren dalam rangka Puncak Peringatan Hari Lahir Thatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) ke-32 Tahun 2022, bertempat di Halaman Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Selasa (22/3/2022).



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

mengucapkan selamat

HARI RAYA NYEPI
Tahun Baru Saka 1944

3 MARET 2022



<https://setda.kalteng.go.id/>



<http://www.facebook.com/SatdaProvKalteng/>



http://www.twitter.com/setda_kalteng



[@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/@sekretariat.daerah.kalteng)



[Sekretariat Daerah Kalteng](https://www.youtube.com/SekretariatDaerahKalteng)